



Minimalisir Pemalsuan SKTM dengan Pakta Integritas

YOGYA (MERAPI) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mendesak pemerintah bersikap tegas dengan pihak yang melakukan pemalsuan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Karena perbuatan tersebut bisa dikenai saksi pidana.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta Bidang Pemantauan dan Investigasi, Baharuddin Kamba meminta dilakukan penandatanganan pakta integritas terkait SKTM. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya SKTM 'abal-abal' di wilayah Kota Yogyakarta.

"Selain itu perlu adanya kunjungan ke rumah (home visit) ke siswa pemegang SKTM. Selain melakukan verifikasi data administrasi setelah siswa diterima di sekolah yang dituju, maka baik orangtua maupun siswa diwajibkan membuat pernyataan surat pakta integritas, yang isinya memuat kesanggupan untuk dikeluarkan dari sekolah, jika data SKTM tersebut tidak benar," ujar Baharuddin Kamba, Minggu (15/7).

Bila ditemukan adanya SKTM palsu dan tak sesuai kenyataan dan pihak siswa enggan keluar dari sekolah maka dapat diproses pidana atas pemalsuan tersebut. Hal ini penting untuk memberikan efek jera juga sebagai rasa keadilan.

"Tetapi harus diantisipasi jika siswa pemilik SKTM ternyata abal-abal dan konsekuensinya dikeluarkan dari sekolah, maka bisa jadi sekolah kekurangan murid. Proses pemindahan sekolah anak harus terus dikawal dan jangan sampai melakukan kebohongan lagi," tegasnya.

(C-5)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 16 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005